

## TRANSFORMASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN : STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LIMBAH INDUSTRI TAHU DAN TANTANGANNYA DI KOTA BLITAR)

Fajri Maulana\*, Wydha Mustika Maharani, Yaen Miftakhul Laily, Masadib Akmal Vyandri, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar

Universitas Jember (UNEJ)

Email\*: [fajrimaulana@unej.ac.id](mailto:fajrimaulana@unej.ac.id)

**Abstract.** This study aims to analyze the implementation of industrial waste management policies in Binjai City, focusing on the role of the Environmental Agency (DLH) in carrying out the policy. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis employed the Miles, Huberman, and Saldana (2014) interactive model through stages of reduction, display, and conclusion drawing. The results indicate that the policy implementation has not been optimal due to limited human resources, insufficient supervision, and low awareness among industry players. Nevertheless, DLH has made efforts through guidance and socialization to improve policy effectiveness. Based on Edwards' (1990) policy implementation theory and the principles of good governance (Singh, 2023), this study emphasizes the importance of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as key determinants of environmental policy success.

**Keywords:** Policy Implementation, Industrial Waste; Environmental Agency; Good Governance

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri di Kota Blitar, dengan fokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran pelaku industri terhadap pengelolaan limbah. Meskipun demikian, terdapat upaya pembinaan dan sosialisasi oleh DLH untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards (1990) dan prinsip good governance (Singh, 2023), penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Limbah Industri; Dinas Lingkungan Hidup; Good Governance

Copyright©2025. Fajri Maulana dan kawan-kawan.

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v2i3.42>

### PENDAHULUAN

Kota Blitar, sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Utara, menghadapi dinamika lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan industrialisasi. Sektor industri pengolahan makanan dan bahan kimia yang mendominasi struktur ekonomi lokal berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, namun di sisi lain menimbulkan tekanan ekologis yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar tahun 2024, tercatat bahwa sekitar 70% industri yang beroperasi di wilayah ini belum memiliki Instalasi Pengolahan Air

**Correspondence** Fajri Maulana  Email: [fajrimaulana@unej.ac.id](mailto:fajrimaulana@unej.ac.id)

*Transformasi Pengelolaan Lingkungan*

Limbah (IPAL) yang berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut memperbesar risiko pencemaran lingkungan, khususnya terhadap sumber daya air, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pencemaran sungai serta menurunnya kualitas air tanah di kawasan permukiman sekitar wilayah industri.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang cukup signifikan. Penurunan kualitas lingkungan hidup berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, menimbulkan ketegangan sosial antara masyarakat dan pelaku industri, serta menghambat upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri menjadi isu strategis yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat sipil.

Meskipun pemerintah daerah telah merumuskan berbagai kebijakan pengendalian dan pengelolaan limbah industri, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya anggaran, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama dalam realisasi kebijakan tersebut. Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards (1990), keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dengan berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri di Kota Blitar. Analisis difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana interaksi antarvariabel dalam kerangka implementasi kebijakan mempengaruhi pencapaian tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi pengembangan model implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual, khususnya pada daerah dengan karakteristik industri kecil dan menengah seperti Kota Blitar.

## Literature Review

Edwards (1990) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan kompleks, di mana keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Keempat komponen tersebut berinteraksi secara simultan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kegagalan pada salah satu unsur dapat mengakibatkan kebijakan tidak terlaksana secara optimal atau bahkan mengalami distorsi dalam praktiknya. Selanjutnya, Subarsono (2011) menambahkan bahwa dimensi politik dan sosial pada tingkat lokal turut berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Kondisi sosial-politik yang kondusif dapat memperkuat proses implementasi, sedangkan dinamika politik yang tidak stabil atau resistensi sosial justru dapat menjadi hambatan struktural maupun kultural.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, teori *good governance* (Singh, 2023) memberikan landasan normatif yang kuat untuk memahami bagaimana prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik menjadi

indikator fundamental yang mencerminkan keberhasilan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik tidak hanya menekankan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan.

Lebih lanjut, Mina (2016) menyoroti pentingnya desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan instrumen kebijakan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologi lokal. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan lingkungan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul di tingkat daerah, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Dengan mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan publik dan prinsip *good governance* dalam kerangka desentralisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah industri di Kota Blitar. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara faktor struktural, politik, dan sosial dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan lingkungan di tingkat pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap secara holistik konteks sosial, institusional, dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan serta interaksi antaraktor yang terlibat di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui berbagai teknik, antara lain wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional di DLH Kota Blitar, perwakilan pelaku industri, serta anggota masyarakat yang terdampak oleh kebijakan lingkungan. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik implementasi kebijakan, disertai dengan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, dan peraturan terkait.

Proses analisis data mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini memungkinkan analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki kedalaman dan konsistensi yang tinggi.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi baik terhadap sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen, sementara triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi antara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami dan memperkuat implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan di DLH Kota Blitar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar telah melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah industri dengan berpedoman pada regulasi nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi kebijakan tersebut menegaskan bahwa arah pengelolaan lingkungan di tingkat daerah masih bersifat top-down, di mana kebijakan nasional menjadi acuan utama tanpa diimbangi oleh perangkat regulasi daerah yang bersifat spesifik dan kontekstual terhadap kondisi lokal. Ketiadaan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tata kelola limbah industri menyebabkan DLH Kota Blitar lebih berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan dibandingkan sebagai aktor perumus kebijakan lokal.

Dalam pelaksanaannya, DLH menjalankan berbagai program seperti sosialisasi pengelolaan limbah kepada pelaku industri, pelaksanaan pemantauan berkala terhadap aktivitas pembuangan limbah, serta pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Meskipun program tersebut telah berjalan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kapasitas pegawai pengawas lingkungan, berdampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan. Akibatnya, kegiatan pengendalian limbah belum dapat menjangkau seluruh sektor industri secara komprehensif.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri di Kota Blitar ditopang oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta dukungan regulasi nasional yang memberikan landasan hukum yang kuat. Selain itu, bentuk kerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah terpadu dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kolaborasi ini menjadi salah satu modal sosial penting dalam mewujudkan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya sejumlah hambatan yang bersifat struktural dan operasional. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam hal jumlah maupun kompetensi teknis, alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku industri terhadap kewajiban pengelolaan limbah. Banyak industri kecil dan menengah (IKM) belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena kendala finansial dan kurangnya insentif kebijakan dari pemerintah daerah. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif oleh DLH terhadap pelanggaran lingkungan belum dilakukan secara konsisten dan tegas, sehingga menurunkan efek jera bagi pelaku industri. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edwards (1990) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, komunikasi, dan disposisi para pelaksana kebijakan.

### **Dampak dan Tantangan Tata Kelola**

Kelemahan dalam tata kelola pengelolaan limbah industri di Kota Blitar memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan, khususnya terhadap sumber daya air.

Berdasarkan temuan lapangan, peningkatan tingkat pencemaran air di beberapa sungai di sekitar kawasan industri menunjukkan belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Masyarakat sekitar melaporkan berbagai keluhan, seperti bau tidak sedap dan penurunan kualitas air yang berdampak pada aktivitas domestik dan kesehatan lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat masih belum berjalan efektif.

Dalam kerangka *good environmental governance* sebagaimana dikemukakan oleh Singh (2023), partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan di Kota Blitar masih terbatas pada aspek pelaporan atau pengaduan, belum mencakup keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya penguatan tata kelola lingkungan yang bersifat kolaboratif (*collaborative governance*), dengan menempatkan masyarakat, industri, dan pemerintah sebagai mitra strategis dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi DLH Kota Blitar adalah membangun sistem tata kelola lingkungan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis data, sehingga kebijakan pengelolaan limbah industri tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dalam mencegah degradasi lingkungan.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri di Kota Blitar hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Dari aspek struktural, keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan menyebabkan proses implementasi berjalan kurang optimal. Dari sisi teknis, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan limbah, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di sektor lingkungan, turut menghambat pencapaian target pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, faktor sosial seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku industri terhadap pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab memperburuk kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya finansial, teknis, dan kelembagaan, serta belum memadainya regulasi lokal, menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini menuntut adanya penguatan tata kelola lingkungan yang berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri tidak hanya bergantung pada aspek regulatif semata, tetapi juga pada kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten. Integrasi ketiga elemen tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di Kota Blitar dan menjadi model praktik tata kelola lingkungan berkelanjutan bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. (2024). *Laporan Tahunan Kinerja Pengelolaan Limbah Industri 2023/2024*. Blitar: DLH Kota Blitar.
- Edwards, George C. III. (1990). *Public Policy Implementation*. London: JAI Press Inc.
- Fattah, Nanang. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadiyanti, R. R. (2017). Implementasi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pemerintah kota samarinda. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(3), 985-997.
- Kasmad, Rulinawaty. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Press.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Penerbit Tahta Media.
- Suaib, H., Rakiá, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Singh, A. (2023). A theoretical understanding of governance and good governance. *VIDYA-A Journal of Gujarat University*, 2(1), 39-47.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Husaini. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.